

JILBAB DAN POTENSI EKSKLUSIVITAS

POLWAN

(Studi Respon Polwan Terhadap Wacana Polwan Berjilbab di Polda D.I

Yogyakarta)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Jesika Eva Nur Subaidah

Nim: 10540058

**JURUSAN SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Surat Persetujuan Skripsi / Tugas Akhir

Lamp : 1 Halaman

Kepada

Yth, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Jesika Eva Nur Subaidah

NIM : 10540058

Judul Skripsi : Jilbab dan Potensi Eksklusivitas Polwan di Polda D.I Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Jurusan Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Februari 2014
Pembimbing

Dr. Munawar Ahmad, SS, M. Si
NIP. 196910172002121001



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/A03./2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: *Jilbab dan Potensi Eksklusivitas Polwan di Polda D.I Yogyakarta*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : *Jesika Eva Nur Subaidah*

NIM : *1540058*

Telah dimunaqasyahkan pada : *Kamis 30 Januari 2014*

Nilai munaqasyah : *A/B*

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Dr. Munawar Ahmad, SS, M.Si
NIP. 196910172002121001

Penguji I

Dr. Moh. Soehadha, S.Sos. M. Hum
NIP. 19720417199931003

Penguji II

Rr. Siti Kurnia Widiastuti, M. Pd., Ma
NIP. 197409192005012001

Yogyakarta, 5 Februari 2014
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam

Dekan



Dr. H. Syafiq Nur, M.Ag
NIP. 19620718198803105

MOTTO

“When there is a Will there is a way”

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

(Q.s. Asy-Syarh:6)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan Kepada:

*Ibu dan bapakku yang tiada hentinya selalu Mendoakan aku
dimanapun aku berada.*

*Saudara-saudaraku yang selalu mendukung sampai
terselesaikannya studiku.*

Teman-temanku prodi Sosiologi Agama.

*Almamaterku Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat terpercaya, dan kepada para sahabatnya, serta seluruh keluarganya.

Inilah skripsi dengan judul ”*Jilbab Dan Potensi Eksklusivitas Polwan Di Polda D.I.Y Yogyakarta*” yang penulis susun untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Sosiologi pada Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Di dalam penelitian skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian yang dilakukan tidak akan terselesaikan dengan mudah tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.H. Syaifan Nur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag. M.Hum, MA, selaku ketua jurusan Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Munawar Ahmad, SS, M.Psi, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak ilmu, menularkan sikap untuk tetap optimis dan terus berusaha.

4. Ibu Nurus Sa'adah selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, M. Pd., M.A dan Dr. Moh. Soehadha, S.Sos. M. Hum selaku penguji I dan penguji II dalam sidang skripsi.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Brigjen.Haka Astana selaku Kapolda D.I Yogyakarta yang telah memberikan izin riset di Polda D.I Yogyakarta.
8. Heri Fatnanta, Psi selaku Kabag Psi RO SDM Polda D.I Yogyakarta yang telah banyak memberikan informasi seputar Polda D.I Yogyakarta.
9. Brigadir.Imam Muttaqin, SH, Bripda.Rina Kurnia, Brigadir.Rosyada Galih Bintoro, SH, yang telah banyak membantu dalam kelancaran mengerjakan skripsi.
10. Ibu R. Khairiyah dan Bapak Moh. Fadli yang tiada hentinya selalu mendoakan aku, demi tercapainya cita-citaku dan selalu memberikan yang terbaik buat aku.
11. Saudara-saudaraku, Imam Muttaqin, Herlina Indah, Nur Ayu Derajati, dan Faliqul Isbahah, yang selalu mendoakan aku dan mendukung lancarnya studiku.
12. Kak Dahlan yang selalu sabar mengajarku, banyak membantu dan memotivasi dalam mengerjakan skripsi.
13. Teman-temanku Prodi Sosiologi Agama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
14. Mbak Fitri yang sudah banyak membantu memberikan informasi.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada siapapun yang membaca dan mempelajarinya.

Hanya kepada Allah tempat memohon taufik dan pertolongan-Nya demi kebaikan hamba-Nya dan akhir dari doa, yaitu Alhamdulillahirabbil ‘alamin.

Yogyakarta, 10 Februari 2014

Peneliti

Jesika Eva N.S

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Jenis Data	15

3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Teknik Analisi Data.....	19
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II GAMBARAN UMUM POLDA D.I YOGYAKARTA

A. Ruang Lingkup Polda D.I Yogyakarta.....	22
1. Sejarah dan Perkembangan Polda D.I Yogyakarta.....	22
2. Visi dan Misi Polda D.I Yogyakarta	39
3. Makna dan Arti Lambang	45
4. Data Rill Personel dan PNS Polda D.I Yogyakarta.....	50
B. Etika Kepolisian.....	55
1. Etika Kenegaraan.....	55
2. Etika Kelembagaan.....	56
3. Etika Kemasyarakatan.....	56
4. Etika Kepribadian.....	57
C. Aturan Berpakaian.....	57

BAB III JILBAB SEBAGAI UPAYAMENGGANGKAT CITRA POLRI

A. Wacana Jilbab Dalam Konteks Kepolisian.....	60
B. Wacana Jilbab di Indonesia.....	61
C. Citra Polri di Masyarakat	66
D. Polwan dan Jilbab.....	69
E. Argumen Kapolri Mengenai Jilbab Polwan	71
F. Respon Polda D.I Yogyakarta	74

BAB IV POLWAN BERJILBAB DALAM KONTROVERSI

A. Polisi Wanita Dalam Sejarah Indonesia.....	77
B. Respon Polwan Polda D.I Yogyakarta Terhadap Seragam Berjilbab	81
1. Relasi Positif	84
2. Relasi Netral.....	86
3. Relasi Negatif	87
C. Relasi Publik (Polisi Laki-Laki dan Masyarakat).....	89
1. Relasi Positif	90
2. Relasi Negatif	91
D. Polwan Berjilbab dan Tugas Pelayanan.....	93

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	96
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA	101
-----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Polda di Indonesia	32
Tabel 2.2 Data Riil Personel Polri di Mapolda D.I Yogyakarta.....	51
Tabel 2.3 Data Personel Polisi Laki-Laki Mapolda D.I Yogyakarta	51
Tabel 2.4 Data kuat pers polwan Mapolda D.I. Yogyakarta bulan Juni 2013.....	53
Tabel 2.5. Data Kuat Pers Polwan Mapolda D.I. Yogyakarta bulan Juni 2013 ...	54
Tabel 2.6. Data Kuat Pers Polwan Mapolda D.I. Yogyakarta bulan Juni 2013 ...	54
Tabel 2.7 Data Agama Mapolda D.I Yogyakarta.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lambang Tribatra	45
Gambar 2.2 Lambang Polda DIY	46
Gambar 2.3 Lambang Polwan	47
Gambar 4.1 Contoh desain jilbab polwan 1	82
Gambar 4.2 Contoh desain jilbab polwan 2	82
Gambar 4.3 Contoh desain jilbab polwan 3	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Informan	106
Lampiran II Pedoman Wawancara	108
Lampiran III Pedoman Observasi	110
Lampiran IV Argumen Kapolri	111
Lampiran V Argumen Wakapolri	113
Lampiran VI Contoh Model Jilbab	117
Surat Izin Riset	122
Curriculum Vitae	124

ABSTRAK

Jilbab adalah busana muslimah, yaitu suatu pakaian yang tidak ketat dengan ukuran lebih besar yang menutup tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan sampai pergelangan. Pakaian jilbab lahir pada abad XIX dan kembali marak sekitar dua puluh tahun terakhir, banyak wanita muslimah di Indonesia yang dengan kesadaran tinggi memakai jilbab. Bukan hanya ketika menghadiri acara-acara atau ritual keagamaan saja tetapi sudah merambah ke berbagai bidang aktifitas kehidupan masyarakat bahkan berbagai departemen dan perusahaan nasional maupun internasional. Maraknya berjilbab di Indonesia disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang mengeluarkan SK No. 100 tahun 1991 yang intinya membolehkan penggunaan jilbab disetiap lembaga pendidikan, bahkan maraknya pemakain jilbab di Indonesia menembus batas-batas profesi termasuk konteks ini adalah Polisi Wanita (Polwan) yang berada dalam naungan instansi Kepolisian Republik Indonesia.

Jilbab adalah simbol agama yang mulai masuk ke dalam instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga mendatangkan respon pro dan kontra dari berbagai belah pihak, mulai dari pejabat Negara, organisasi masyarakat, dan pejabat tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pokok masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana jilbab berperan dalam pelayananan, guna membangun citra Polri yang buruk disebagian masyarakat karena oknum Polri yang tidak bertanggung jawab. Seperti pemikiran Mead simbol adalah alat komunikasi baik verbal (yang dihasilkan oleh alat bicara) ataupun non verbal (yang menggunakan anggota badan, tanda yang diciptakan oleh manusia, dan benda yang bermakna kultural dan ritual).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekskriptif kualitatif yang menghasilkan penggunaan seragam Polwan berjilbab di Polda D.I Yogyakarta dapat memperbaiki citra Polri yang buruk karena oknum tidak bertanggung jawab disebagian masyarakat kecil, namun tetap harus ada peraturan yang jelas atau tertulis agar citra Polri yang natural dan plural tidak hilang dari badan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tidak ada perubahan pelayanan yang signifikan dari penggunaan seragam dinas Polwan berjilbab, karena Polri telah mempunyai peraturan internal tentang pelayanan dimana peraturan tersebut harus diikuti oleh semua personel anggota Polri. Namun jilbab dalam instansi Kepolisian dapat membantu memperbaiki citra Polri yang buruk disebagian masyarakat karena jilbab sebagai simbol agama berperan penting dalam kharisma pada masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam pada hakikatnya adalah jaminan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan umat manusia. Salah satu dari kemaslahatan adalah pakaian. Budaya pakaian adalah salah satu ciri peradaban manusia sebagai makhluk terhormat.¹ Pakaian sebagai busana akan selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tradisi yang ada. Ia selalu mengalami daur ulang, berputar, bervariasi mengikuti zamannya. Dengan begitu dari pakaian yang dikenakan sering kali dapat diketahui identitas diri pemakainya.² Oleh karena itu, masalah pakaian adalah masalah kemanusiaan, Di dalamnya terkait harkat dan martabat manusia, yang mana berpakaian terkait dengan kewajiban umat Islam untuk menutup aurat.³

Pada zaman modern begitu banyak mode pakaian sudah diciptakan orang. Mulai dari yang sempit sampai yang longgar, mulai dari bahan yang sangat

¹ K.H Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial* (Bandung: Mirzan, 1994), hlm. 249

² Suririn, "Pakaian Perempuan Perspektif Al-Quran", *Majalah Aula*, April 2000, No 04/ThXXII, hlm. 63

³ Menurut bahasa aurat adalah celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan. *Kamus AL-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, A.W. Warson Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm 984. Dalam disiplin hukum Islam aurat adalah bagian dari tubuh yang pada prinsipnya tidak boleh kelihatan, kecuali dalam keadaan darurat, menutup aurat bagian dari kewajiban setiap muslim, baik ketika sedang melaksanakan ibadah maupun ketika sedang berinteraksi dengan sesama manusia. Pada umumnya mayoritas para ahli tafsir dan para ahli fiqh klasik menyuatkan untuk kewajiban untuk menutup aurat dan berjilbab.

sederhana sampai bahan yang sangat mahal, baik untuk kaum Adam maupun untuk kaum Hawa. Terutama untuk kaum Hawa, karena tubuh perempuan biasanya dijadikan objek seksual bagi laki-laki. Zaman sekarang, busana perempuan mulai dari mode yang terbuka menampakkan perhiasannya, lalu yang sangat sempit yang menonjolkan *sex appeal*-nya⁴ sampai pada mode yang sangat tertutup. Islam sebagai agama yang sempurna sejak 15 abad yang lalu sudah mengatur masalah busana ini, terutama untuk kaum perempuan.⁵

Salah satu ajaran Islam, yang mengatur masalah busana yang banyak diklaim sebagai budaya Islam adalah jilbab. Ayat-ayat yang bercerita mengenai jilbab ini turun untuk merespon kondisi dan konteks budaya masyarakat, yang penekanannya kepada persoalan etika, hukum, dan keamanan masyarakat di mana ayat itu diturunkan.⁶ Meskipun antara satu dengan lainnya terdapat perbedaan persepsi terhadap penafsiran makna jilbab itu sendiri, tetapi tetap mengarah kepada sebuah bentuk pakaian. Al-Qurtubi memberikan pengertian bahwa jilbab adalah baju kurung longgar atau lebar dan lebih lebar dari selendang atau kerudung.⁷ Menurut Ibnu Abbas dan Katada yang diikuti oleh Abu Hayyan, jilbab

⁴ *Sex appeal* biasanya digunakan bagaimana seseorang berpenampilan menarik didepan umum. Umumnya dipakai untuk dunia bisnis, bagaimana untuk strategi marketing.

⁵ Darby Jusbar Salim, *Busana Muslim Dan Permasalahannya* (Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembinaan Lembaga Islam Departemen Agama RI, 1984), hlm. 3.

⁶ Nasarudin Umar, *Menstrual Taboo Dalam Kajian Kultural Dan Islam Dalam Islam Dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 34.

⁷ 'Abdullah Muhammad Al-Qurtubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran*, cet. Ke-1 (Beirut: Dar Al-Qutub Al-Aliyah, 1993) hlm. 156.

sejenis pakaian yang menutup pelipis dan hidung meskipun kedua mata pemakainya terlihat namun tetap menutup dada dan bagian mukanya.⁸

Ajaran Islam bertujuan membatasi seluruh bentuk pemuasan seksual, hanya pada lingkungan keluarga dan perkawinan dalam ikatan pernikahan, sehingga masyarakat hanya merupakan sebuah tempat untuk beraktivitas dan bekerja. Berbeda dengan Barat dewasa ini yang membaurkan pekerjaan dengan kesenangan seksual. Islam memisahkan sepenuhnya kedua lingkungan ini.⁹

Menurut Abu Syuqqah ada tiga penekanan fungsi jilbab. Pertama jilbab untuk menutup aurat bagi perempuan untuk melindungi diri dari fitnah, baik ketika sedang bergaul dengan laki-laki yang secara hukum bukan termasuk mahramnya. Kedua, jilbab untuk menjaga dan melindungi kesuciaan, kehormatan, dan kemuliaanya seorang perempuan, ketiga menjaga identitas sebagai perempuan muslimah yang membedakan dengan perempuan lain.¹⁰

Belakangan pro-kontra seputar pembagian pemakaian jilbab kembali mencuat. Setelah Islam berkembang dan menjadi mayoritas agama masyarakat Indonesia, semakin banyak kaum wanita yang mengenakannya, baik dalam lingkungan formal maupun lingkungan non formal. Fenomena ini semakin meningkat ketika adanya legitimasi pemerintah yang membolehkan jilbab dipakai

⁸ Nasaruddin Baidan, *Tafsir Bi Al-Ra'yi Upaya Panggilan Konsep Wanita Dalam Al-Quran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 19.

⁹ Murtadha Mutahhari, *Hijab: Gaya Hidup Wanita Islam* Terj. Efendi (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 19.

¹⁰ Abu Syuqqah, *Busana Dan Perhiasan Wanita Menurut Al-Quran Dan Hadis* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 20.

di tempat-tempat umum maupun sekolahan umum.¹¹ Jilbab bukan lagi fenomena kelompok sosial tertentu, tetapi sudah menjadi fenomena seluruh masyarakat. Fenomena ini sudah menyebar di tengah politisi wanita, professional, pedagang, artis, eksekutif, dan publik figur lainnya menggemari dan menggunakannya.¹²

Persoalan jilbab sampai sekarang masih diperdebatkan. Berbagai macam argumen dikeluarkan untuk mendukung berbagai kontroversi pandangan tentang jilbab. Seperti ulama-ulama terdahulu yang terkesan ketat dalam berpendapat mengenai jilbab dan cendekiawan kontemporer yang dinilai longgar. Ada yang berpendapat bahwa jilbab itu wajib bagi kaum Muslim yang sudah baligh, apabila tidak dia telah melanggar hukum Allah. Adapula yang berpendapat bahwa jilbab hanya produk budaya dari bangsa Arab sedangkan bangsa lain bukan budayanya seperti di Indonesia.

Polisi wanita merupakan bagian integral dari institusi Polri, terus berupaya untuk meningkatkan profesionalisme Kepolisian selaku pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sesuai semboyan Polwan yaitu “*Esthi Bhakti Warapsari*” yang berarti bhakti putri-putri pilihan, menuju ke arah cita-cita luhur, Polwan bertekad memberikan pengabdian terbaik untuk kesatuan.

¹¹ Sriharini, “ jilbab dan kiprah perempuan dalam sektor publik”, dalam *jurnal PMI*, Vol. IV. NO. 1, September, 2008, hlm. 34.

¹² Fenomena pemakaian jilbab ini seiring dengan munculnya perda-perda yang mengatasmakan syariat Islam, seperti intruksi, Walikota Padang tahun 2005 yang mewajibkan pemakaian jilbab dan busana Islam dan anjuran bagi non Muslim, perda Kota Tangerang, Gorontalo dan daerah otonomi khusus Nangro Aceh Darussalam (NAD), daerah Tasikmalaya tahun 2001, Cianjur tahun 2001, Solok Sumatera Barat 2002, Indramayu tahun 2001, Maros tahun 2002, bulukumba 2003, Deserang, Pandeglang, Lebak dan daerah lain yang semuanya mengarah pada kewajiban jilbab. “Syariat Islam Dijalur Lambat”, dalam *Majalah Tempo*, No. 11/XXXV/ edisi 8-14 Mei 2006, hlm. 29.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut pasal 13 UU Kepolisian No 2 tahun 2002 adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹³

Disebutkan pada pasal 17 pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal 19 (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pejabat Kepolisian Negara republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. (2) dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.¹⁴

Dikaitkan dengan tugas pokok Polri tersebut, Polwan dituntut untuk professional, mempunyai moral yang baik dan selalu mengembangkan dirinya sesuai perubahan lingkungan sehingga kehadiran Polwan pada organisasi Polri, Di tengah-tengah masyarakat tidak hanya sebagai penghias atau pelengkap saja, tetapi juga sebagai pribadi yang bisa diandalkan sebagaimana filosofi Polwan “*Bukan Mawar Penghias Taman Tetapi Melati Pagar Bangsa*” yang artinya tidak

¹³ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 80

¹⁴ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 84

sebagai penghias keindahan saja, tetapi peran aktif sebagai sosok anggota Polri yang *responsive, adaptif, dan proaktif*.

Dihadapkan dengan tantangan tugas yang semakin kompleks dan tugas pokok Kepolisian Polwan dituntut untuk mampu menampilkan kinerja yang optimal. Dalam hal ini Polwan harus siap dengan tugas utamanya yaitu melindungi, mengayomi dan melayani seluruh masyarakat Indonesia. Melihat tugas pokok anggota Polwan yang harus selalu aktif jika dikaitkan dengan wacana “Polwan berjilbab” maka akan terasa unik dengan tugas pokoknya sebagai anggota Polwan yang harus mengayomi seluruh masyarakat tanpa membedakan agama, sosial, dan kedudukan. Penulis anggap hal ini penting untuk diteliti selain dari peraturan yang sudah ada mengenai seragam dinas PNS dan anggota Polri. Karena pelayanan prima dari seorang anggota Polwan tentunya untuk seluruh masyarakat tanpa membedakan agama, sedangkan mengenakan pakaian dapat menunjukkan identitas diri seseorang serta pengaruh dari pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Dari wacana Polwan berjilbab ini tentunya akan mendatangkan respon dari berbagai pihak, khususnya anggota Polwan sendiri, karena anggota Polwan di Polda D.I Yogyakarta juga berasal dari latar belakang keyakinan yang bervariasi dan respon dari masyarakat pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis ajukan ada beberapa hal yang menjadi permasalahan sehingga melahirkan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana respon anggota Polwan dan Polisi Polda D.I yogyakarta serta masyarakat terhadap wacana Polwan berjilbab?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap wacana Polwan berjilbab?
3. Bagaimana potensi eksklusivitas dalam pelayanan Polwan terhadap masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui respon dari anggota Polwan POLDA DIY mengenai wacana Polwan berjilbab, dan untuk mengetahui respon masyarakat yang akan mendapat pelayanan dari anggota Polwan tentang wacana Polwan berjilbab.
2. Guna mengetahui eksklusivitas yang akan muncul dalam pelayanan Polwan terhadap masyarakat.

Sedangkan kegunaannya adalah:

1. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi upaya revisi surat keputusan pemakaian seragam Polri dan PNS Polri.
2. Sebagai sumbangsih dalam dunia keputakaan, khususnya dalam tema jilbab.

D. Tinjauan Pustaka

Secara umum buku-buku, tulisan-tulisan dan komentar yang membahas tentang jilbab atau hijab sudah banyak dilakukan oleh ulama baik dalam bentuk literatur klasik maupun modern, dengan menggunakan metode-metode yang berbeda.

Skripsi Diah Ulfa yang berjudul “*Studi kritis terhadap pemikiran jaringan Islam liberal (JIL) tentang pemakaian jilbab*” menjelaskan bahwa jilbab bukanlah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perempuan. Jilbab digunakan atas dasar kesadaran tanpa paksaan, jilbab hanyalah merupakan tradisi Arab.¹⁵

Skripsi Qoidud Duwal yang berjudul “*Konsep jilbab dalam hukum Islam (Studi Pemikiran K.H Husein Muhammad)*” menjelaskan bahwa pemikiran Husein Muhammad mengenai jilbab terlihat berbeda dengan mayoritas pandangan-pandangan ulama klasik. Husein berkesimpulan bahwa jilbab hanyalah sebuah tradisi Arab, di mana fungsi jilbab hanyalah sebagai pembeda status sosial masyarakat, bukan sebagai status agama, yaitu kelas perempuan merdeka dengan perempuan budak. Latar belakang Husein Muhammad dalam hukum jilbab sudah jelas, yaitu sebagai pembeda status sosial masyarakat, bukan sebagai status agama, yaitu kelas perempuan merdeka dengan perempuan budak. Konteks turunnya ayat pada waktu itu sesuai dengan zamannya, di mana waktu itu masih ada perbudakan. Sedangkan dalam era sekarang perbudakan sudah dihapus oleh

¹⁵ Diah Ulfa, “*Studi Kritis Terhadap Pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL) Tentang Pemakaian Jilbab*”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hlm. 10

masyarakat. Maka kewajiban jilbab terhapus seiring dengan dihapuskan perbudakan.¹⁶

Fadwa El Guindi dalam bukunya yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia; *Jilbab; Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan* mengemukakan bahwa berjilbab lebih merupakan identitas serta kerahasiaan pribadi dari sisi ruang dan tubuh. Wacana publik tentang jilbab seringkali berputar-putar pada pertanyaan: apakah ia sebuah ekspresi kultural Arab ataukah substansi ajaran agama; apakah ia sebuah simbol kesalehan dan ketaatan seseorang terhadap otoritas agama ataukah simbol perlawanan dan pengukuhan identitas seseorang? Banyak feminis “beraliran” Barat memandangnya sebagai sebuah bias kultur *patriarkhi* serta tanda keterbelakangan, *subordinasi* dan penindasan terhadap perempuan. Pada titik ini, jilbab sebenarnya masuk pada arena kontestasi sebuah permainan makna dan tafsir. Relasi-kuasa bermain dan saling tarik antara kalangan agamawan normatif dan feminis liberal; antara atas nama kepentingan norma (tabu, aurat, kesucian, dan privasi) dan atas nama kebebasan perempuan (ruang gerak, persamaan dll). Dalam konteks kekinian, jilbab juga menjadi simbol identitas, status, kelas dan kekuasaan. Menurut Crawley, misalnya, pakaian adalah ekspresi yang paling khas dalam bentuk material dari berbagai tingkatan kehidupan sosial sehingga jilbab menjadi sebuah eksistensi sosial, dan individu dalam komunitasnya.¹⁷

¹⁶ Qoidud Duwal, “*Konsep Jilbab Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran K.H Husein Muhammad)*”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hlm. 3

¹⁷ Fadwa El Guindi, *Veil: Modesty, Privacy Dan Resistance* Terj. Mujiburohman (Jakarta: Serambi, 2003), hlm. 45

M. Quraish Shihab menulis buku yang berjudul “*Jilbab pakaian wanita muslimah pandangan ulama masa lalu dan cendekiawan kontemporer*” menjelaskan bahwa fungsi pakaian adalah sebagai pembeda antara yang seseorang dengan selainnya dalam sifat dan profesinya. Sepakat ulama menyatakan bahwa perintah berjilbab merupakan tuntunan kepada istri-istri Nabi serta kaum Muslimah. Sementara ulama kontemporer memahaminya hanya belaku pada zaman Nabi SAW. Di mana ketika itu ada perbudakan dan diperlukan adanya pembeda antara mereka dan wanita-wanita merdeka, serta bertujuan menghindarkan gangguan laki-laki usil. Jika tujuan tersebut telah dapat dicapai dengan satu dan lain cara, maka ketika itu pakaian yang dikenakan telah sejalan dengan tuntunan agama.¹⁸

Abdul Halim Syuqqoh dalam buku “*Busana dan perhiasan wanita menurut Al-Quran dan Hadist*”, mengupas tentang perdebatan di seputar busana dan perhiasan wanita misalnya antara lain: apakah wajah dan telapak tangan wanita merupakan aurat atau bukan, apakah menggunakan perhiasan (termasuk kosmetik) diperkenankan, apakah model pakaian harus meniru dari daerah tertentu. Buku ini juga menjelaskan dalil dari syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam pakaian wanita apabila dia bertemu lelaki asing. Lima syarat tersebut adalah sebagai berikut: 1.) Menutupi semua badan kecuali wajah, dua telapak tangan, dan dua tumit. 2.) Menjaga keserasian dalam perhiasan pakaian, wajah, dan telapak tangan dan dua tumit. 3.) Pakaian dan perhiasan hendaklah dikenal masyarakat muslim. 4.) Pakaian itu berbeda secara keseluruhan dengan pakaian

¹⁸ M Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lenterahati, 2004), hlm. 43.

laki-laki. 5.) Pakaian itu berbeda secara keseluruhan dengan apa yang menjadi ciri wanita kafir.¹⁹

Dari penelusuran tersebut penulis belum menemukan sebuah karya yang membahas secara khusus tentang Polwan berjilbab dari segi metode maupun pandangannya, maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam.

E. Kerangka Teoritik

Respon ditinjau dari segi pengertian etimologi adalah jawaban, tanggapan dan balasan.²⁰ Sedangkan secara terminologi ialah berarti rangsangan-rangsangan yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sikap.²¹ Pendapat lain mengatakan bahwa respon diartikan sebagai goresan dari pengamatan, dan berkelanjutan membentuk sikap setuju dan tidak setuju senang atau tidak senang, menerima atau tidak menerima.²² Sedangkan oleh J.B. Watson, dikatakan bahwa respon itu adalah tanggapan atau balasan (response) terhadap rangsangan.²³ Menurut Zuhairin dan Parjhuri, tanggapan berarti gambaran tentang sesuatu yang tinggal di dalam jiwa setelah terjadinya pengamatan, atau dapat dikatakan sebagai

¹⁹ Abdul Halim Syuqqoh, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Al-Quran dan Hadis* Terj, Mudzakir Abdussalam (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 49

²⁰ Mas'ud Khasan Abdul Qadir, *Kamus Istilah Pengertian Populer*, (Gresik: CV. Bintang Pelajar, t.t.), hlm. 31

²¹ M. Dimiyati Mahmud, *Psikologi Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: BPFE, 1989), hlm. 31

²² Sukanto, *Nafsiologi Suatu Pendekatan Alternatif Atas Psikologi* (Jakarta: Integrita Press, 1985), hlm. 101

²³ Sarilito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 11

bayangan yang tinggal dalam ingatan setelah melakukan pengamatan.²⁴ Seperti halnya wacana seragam dinas Polwan berjilbab mendatangkan respon dari berbagai pihak, di mana respon tersebut menunjukkan setuju dan tidak setuju terhadap pemakaian seragam dinas Polwan berjilbab di dalam instansi Kepolisian. Respon yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggapan dari Polwan, masyarakat dan polisi laki-laki, di mana respon Polwan tentang wacana memakai seragam dinas berjilbab di Polda D.I Yogyakarta dapat meningkatkan citra Polri yang kurang baik di masyarakat, dan respon dari masyarakat ada kekhawatiran munculnya diskriminasi terhadap agama minoritas apabila simbol agama dimasukkan ke dalam instansi Kepolisian. Sedangkan respon dari polisi laki-laki adalah Polwan akan terlihat lebih anggun, karena sebagai wanita Muslim diwajibkan untuk menutup aurat, karena selain mematuhi perintah Negara juga akan mematuhi perintah Allah.

Penampilan fisik seseorang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, kebiasaan, lingkungan, kenyamanan, dan tujuan pencitraan. Seperti dalam mengenakan pakaian banyak orang yang berbusana khas sebagai simbol sebuah kelompok. Seorang Muslimah memakai jilbab sebagai manifestasi ajaran Islam. Simbol adalah sesuatu yang perlu dipelajari, ditangkap dan ditafsirkan maknanya.

George Hebert Mead yang dikenal sebagai pencetus awal teori interaksi simbolik, sangat mengagumi kemampuan manusia untuk menggunakan simbol; dia menyatakan bahwa orang bertindak berdasarkan makna simbol yang muncul di dalam sebuah situasi tertentu. Simbol membentuk esensi dari teori interaksi

²⁴ Zuhairin dan Sukanto, Ilmu Jiwa Umum (Yogyakarta: Yayasan Lembaga Studi Islam dan Sosial, 1986), hlm. 94

simbolik. Sebagaimana dinyatakan oleh namanya, teori interaksi simbolik, menekankan hubungan pada simbol dan interaksi. Nama interaksi simbolik bukanlah ciptaan Mead melainkan ciptaan salah satu muridnya, Hebert Blumer, adalah pencetus istilah ini, tetapi jelas sekali bahwa pekerjaan Mead-lah yang mendorong munculnya pergerakan teoritis ini.

Dalam terminologi yang dipikirkan Mead, setiap isyarat *non verbal* dan pesan *verbal* yang dimaknai berdasarkan kesepakatan bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu interaksi merupakan suatu bentuk simbol yang mempunyai arti sangat penting. Pakaian anggota Polwan Polda D.I Yogyakarta yang meliputi seragam dinas dan atributnya, merupakan isyarat *non verbal* yang dibentuk oleh kesepakatan bersama yang mampu mempengaruhi perilaku sebagai anggota Polwan, dan kepada orang lain yang diberikan isyarat tersebut. Pemberian isyarat berupa simbol maka dapat mengutarakan perasaan, pikiran dan maksud dari seorang anggota Polwan dalam menjalankan profesinya.

Sesuai dengan definisi Mead dalam dasar interaksi simbolik seorang anggota Polwan di mana dalam profesinya selalu terlibat dalam hubungan sosial yang diciptakan, dibangun dan dikonstruksikan di tengah masyarakat. Sehingga dapat mengantarkan anggota Polwan dalam pengambilan peran dalam masyarakat. Relevansi dari teori interaksi simbolik George Hebert Mead dengan penelitian atau realitas yang ada ialah respon dari anggota Polwan terhadap wacana pemakaian jilbab anggota Polwan, yang mana setiap atribut, pakaian atau bahkan jilbab yang akan dikenakan Polwan nantinya akan mengandung isyarat yang akan

mendatangkan respon dari semua pihak dan pengaruh terhadap pelayanan serta kinerja anggota Polwan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilaksanakan secara langsung, yang pada hakekatnya untuk menemukan secara spesifik dan realistis apa saja yang terjadi di masyarakat. Obyek penelitian ini adalah respon anggota Polwan, masyarakat dan polisi laki-laki terhadap wacana Polwan berjilbab dan pelayanannya di Polda D.I Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menitikberatkan terhadap uraian-uraian dari peristiwa yang sedang terjadi pada waktu penelitian. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Polda D.I Yogyakarta. Informan dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa mereka bisa memberikan informasi tentang topik yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Anggota Polwan yang dipilih adalah 3 orang perwakilan dari setiap bidang masing-masing penelitian ini tidak membatasi hanya pada anggota Polwan di bidang tertentu, melainkan seluruh anggota Polwan pada bidang masing-masing di Polda D.I Yogyakarta. Mereka sebagai informan artinya mereka dapat meberikan informasi yang lengkap dan detail karena mereka adalah obyek dari wacana Polwan berjilbab. Perlu diketahui bahwa nama-nama informan yang diwawancarai adalah nama samaran bukan nama yang sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga privasi informan yang diteliti atau diwawancarai.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu data utama dan data pendukung.

- a. Data utama berupa data yang didapat langsung oleh penulis dari hasil penelitian atau observasi lapangan secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan instrumen yang sesuai.
- b. Data pendukung berupa literatur-literatur atau buku-buku yang relevan dengan penelitian yang dianggap sebagai bahan pendukung penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data secara kualitatif, terutama menggunakan pengamatan langsung yang relevan dari obyek penelitian. Adapun jalan yang ditempuh adalah menggunakan beberapa metode di antaranya:

a. Metode observasi

Dalam penelitian ini penulis akan mengadakan suatu pengamatan tentang respon dari anggota Polwan terhadap wacana Polwan berjilbab. Dengan pengamatan akan didapatkan sisi permasalahan yang kemudian ditanyakan kepada informan.

Metode observasi dan pengamatan akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Pengamatan atau observasi dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti dikemukakan oleh Guba dan Lincoln sebagai berikut:

Pertama, teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. *Kedua*, teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, Kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan sebenarnya. *Ketiga*, pengamatan memungkinkan penulis mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. *Keempat*, sering terjadi ada keraguan pada keraguan pada penulis, jang-jangan pada data yang dijangingnya ada yang keliru atau biasa. *Kelima*, teknik pengamatan memungkinkan penulis mampu memahami situasi-situasi yang rumit. *Keenam*, dalam kasus-kasus tertentu di mana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang bermanfaat. Jika di iktisarkan, alasan secara metodologis bagi penggunaan pengamatan atau observasi adalah mengoptimalkan kemampuan penulis dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya. Observasi memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh objek penulis, hidup pada saat itu menangkap arti fenomena dari segi pengertian subyek penelitian. Menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan panutan para subyek pada keadaan saat itu. Observasi memungkinkan penulis merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subyek sehingga memungkinkan pula penulis menjadi sumber data, pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun pihak subyek.²⁵

Proses penelitian secara cermat dilakukan selama 2 bulan terhadap perilaku, kebiasaan, dan situasi yang berkembang terhadap Polwan di Polda D.I Yogyakarta, dimana anggota Polwan sebagai subyek dari penelitian ini, didalam perilaku Polwan misalnya menjalankan tugas kesehariannya di kantor dan menjaga lalu lintas serta kebiasaan dalam bergaul sesama anggota Polwan yang berbeda keyakinan.

b. Metode wawancara atau interview

Wawancara adalah mencakup cara yang diperlukan seseorang untuk suatu tugas tertentu untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari

²⁵ Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 174.

seorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.²⁶ Wawancara merupakan metode kedua dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi setelah observasi. Wawancara dapat difungsikan dalam dua cara: pertama, sebagai metode utama penelitian, dan kedua sebagai pelengkap dalam metode observasi.

Maksud mengadakan wawancara seperti ditegaskan oleh Guba dan Lincoln, antara lain: mengkontruksi orang mengenai orang, kejadian, organisasi, motivasi, tuntunan, kepedulian dan lain-lain. Dalam melakukan wawancara, penulis dituntut bagaimana membuat responden lebih terbuka dan leluasa dalam memberi informasi atau data, untuk mengemukakan pengetahuan dan pengalamannya terutama berkaitan dengan informasi sebagai jawaban penelitian, sehingga terjadi semacam diskusi, obrolan santai, spontanitas (alamiah) dengan responden sebagai pemecah masalah dan penulis sebagai pemancing timbulnya permasalahan sehingga muncul wacana yang detail. Di sini wawancara yang dilakukan berjalan secara terstruktur (terbuka, bicara apa adanya) dalam garis besar yang terstruktur (mengarah menjawab permasalahan penelitian).

Dalam melakukan wawancara pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *life history* untuk menggali pengalaman hidup Polwan dan Polisi laki-laki yang berhubungan dengan jilbab, namun penggalian tentang pengalaman hidup dibatasi hanya dengan sejauh mana pengetahuan informan mengenai jilbab, *background* keluarga, pergaulan

²⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1983, hlm. 129.

sehari-hari dan pendidikan. Penulis sangat hati-hati setiap melontarkan pertanyaan. Awal mulanya memang sulit untuk melakukan pendekatan, karena tidak semua anggota Polwan dan polisi laki-laki dapat memberikan tanggapan hal ini berhubungan dengan agama, dan keputusan pemerintah. Namun penulis tidak mengungkapkan maksud untuk melakukan wawancara. Hal ini dilakukan penulis agar jawaban yang diberikan informan benar-benar murni, bukan jawaban yang dibuat-buat. Penulis berusaha melakukan pendekatan dengan FGD (*focus group discussion*) dengan sedikit-sedikit memasukan pertanyaan kepada Polwan dan Polisi laki-laki yang sedang istirahat siang, sehingga informan tidak sadar kalau kegiatan menggali informasi sedang dilakukan. Sedangkan pada bagian Yanma, Spkt, Rosdm, Rorena, Setum dan Humas dilakukan wawancara secara langsung, di mana penulis menyiapkan berbagai pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan secara individu. Wawancara juga dilakukan terhadap masyarakat, untuk menanyakan respon dari wacana seragam dinas Polwan berjilbab, masyarakat yang dipilih adalah pengunjung Polda D.I Yogyakarta.

c. Metode dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melakukan metode dokumentasi penulis

menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.²⁷

Metode ini dilakukan dalam rangka melakukan pencatatan dokumen, monografi, maupun data yang terkait dengan permasalahan wacana Polwan jilbab di Indonesia, selain itu data metode dokumentasi digunakan untuk menghimpun data yang berhubungan dengan geografi dan demografi. Selain itu dilakukan studi pustaka untuk memperoleh data pendukung yang berhubungan dengan wacana Polwan berjilbab di Indonesia. Data ini diolah dan di analisis sebagai bahan bandingan. Bersama dan utama yang diperoleh melalui penulis di lapangan dengan dukungan data pendukung dan data utama akan dapat dipahami secara lebih tepat.²⁸

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan terus-menerus sejak awal dan selama proses penelitian berlangsung setiap data atau informasi yang diperoleh harus dianalisis, usaha menafsirkan untuk mengetahui maknanya dihubungkan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data. Data utama yang diperoleh di lapangan diketik dalam bentuk laporan sementara, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema atau polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah, disingkat, direduksi, dan disusun lebih sistematis.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 135

²⁸ Matthew B. Miles dan Michei Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 19.

Dengan kata lain merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan sedemikian rupa sehingga kesimpulan final atau yang tesnya dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih tajam hasil pengamatan dan mempermudah penulis untuk mencarinya, jika sewaktu-waktu diperlukan. Hasil wawancara penulis rangkum kemudian dirangkai secara sistematis, sehingga penulis memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hasil penelitian. Tidak semua data hasil wawancara dimasukkan dalam analisis data, namun perlu dipilah agar data atau kutipan wawancara lebih tajam.

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum rancangan penelitian ini tersusun atas beberapa bab, yang terbagi kedalam tiga bagian yaitu pendahuluan, isi dan penutup penulis menyusun menjadi beberapa bab yang masing-masing memuat sub-sub bab.

Bab pertama pendahuluan, merupakan dasar penyusunan skripsi ini. Dalam bab ini penulis membahas tentang signifikansi penelitian dalam latar belakang masalah, pokok masalah dan tujuan penelitian ini. Telaah pustaka, akan menelusuri hasil penelitian sejenis sebelumnya, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan akan mengerahkan pembahasan yang akan dikaji agar tidak keluar dari kerangka teoritik dan metode penelitian.

Bab kedua secara umum membahas tentang gambaran umum Polda D.I Yogyakarta, yang dibagi menjadi sub bab pada poin A, ruang lingkup Polda D.I

Yogyakarta yang membahas sejarah dan perkembangan Polda D. I Yogyakarta, visi dan misi Polda D.I Yogyakarta, makna dan arti lambang, dan data riil personel Polri dan PNS Polda D.I Yogyakarta. Pada poin B, membahas tentang etika Kepolisian dan poin C, aturan berpakaian.

Bab ketiga membahas tentang wacana jilbab sebagai upaya megangkat citra Polri di Indonesia, dibagi menjadi 5 sub bab, poin pertama membahas wacana jilbab dalam konteks Kepolisian, poin kedua tentang wacana jilbab di Indonesia, poin ketiga tentang citra Polri di masyarakat, poin keempat tentang Polwan dan jilbab, dan poin yang kelima mengenai argumen Kapolri mengenai jilbab Polwan.

Bab empat membahas tentang Polwan berjilbab dalam kontroversi, yang dibagi menjadi beberapa sub bab, antara lain Polisi wanita dalam sejarah Indonesia, respon Polda D.I Yogyakarta terhadap seragam berjilbab, relasi publik tentang penggunaan seragam Polwan berjilbab dan Polwan berjilbab dalam tugas pelayanan.

Bab kelima merupakan penutup, yaitu kesimpulan tentang penelitian ini dan saran-saran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada akhir pembahasan skripsi ini maka penulis akan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jilbab adalah pakaian wanita Muslimah yang merupakan simbol agama banyak digemari perempuan di Indonesia, beberapa tahun belakangan jilbab telah menjadi *trend* perempuan di Indonesia dan kesadaran pemakain jilbab perempuan di Indonesian bertambah meningkat, jilbab tidak lagi hanya dipakai pada saat menghadiri acara-acara atau ritual keagamaan saja, melainkan telah masuk dalam lembaga pendidikan dengan dikeluarkannya SK No. 100 tahun 1991 yang intinya membolehkan penggunaan jilbab di setiap lembaga pendidikan, jilbab juga menyentuh ibu rumah tangga, pegawai kantor, dan artis sebagai *public figure* sehingga dapat mempengaruhi masyarakat dalam berpakaian. Maraknya pemakain jilbab di Indonesia juga menembus batas-batas profesi termasuk polisi wanita (Polwan) yang berada dalam naungan institusi Kepolisian Republik Indonesia.
2. Wacana tentang pemakain seragam dinas Polwan berjilbab ada sejak tahun 2009 pada masa jabatan Timur Pradopo sebagai Kapolri Negara Republik Indonesia.

Pada tahun 2013 wacana pemakain seragam dinas Polwan berjilbab mulai muncul kembali setelah Jenderal.Pol.Sutarman menjabat sebagai Kapolri Negara Republik Indonesia. Pemakaian seragam dinas Polwan berjilbab belum dilaksanakan di Polda D.I Yogyakarta, dan belum ada perencanaan khusus mengenai wacana tersebut dikarenakan belum adanya peraturan tetap mengenai penggunaan seragam dinas Polwan berjilbab, walaupun Jenderal.Pol.Sutarman sebagai Kapolri telah memberikan himbauan bagi anggota Polwan Muslimah yang ingin menggunakan. Polwan Polda D.I Yogyakarta tetap mengacu kepada peraturan Surat Keputusan (SK) Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005 di mana tidak tertulis poin mengenai pemakain jilbab.

3. Respon Polwan di Polda D.I Yogyakarta tentang penggunaan seragam Polwan berjilbab dibagi menjadi 3 kategori.
 - a. Relasi positif adalah kelompok yang setuju dengan pemakain seragam dinas Polwan berjilbab.
 - b. Relasi netral adalah kelompok yang netral dengan adanya seragam dinas Polwan berjilbab dan,
 - c. Relasi negatif adalah kelompok yang tidak setuju dengan seragam Polwan berjilbab.

Dari hasil riset penggunaan seragam Polwan berjilbab dapat memperbaiki citra Polri yang buruk karena oknum tidak bertanggung jawab disebagian masyarakat kecil, namun tetap harus ada peraturan yang jelas atau tertulis dan

kebijakan-kebijakan agar citra Polri yang natural dan plural tidak hilang dari badan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Potensi yang muncul dengan penggunaan seragam dinas Polwan berjilbab adalah:
 - a. Polwan yang termasuk dalam relasi positif, Polwan akan merasa lebih nyaman dengan seragamnya karena sebagai seorang Muslimah Polwan di Polda D.I Yogyakarta dapat menjalankan perintah Allah untuk menutup aurat, dan dapat meningkatkan citra Polri yang kurang baik di masyarakat.
 - b. Polwan yang termasuk dalam relasi netral, mereka tidak mempermasalahkan adanya perbedaan seragam yang akan digunakan Polwan di Polda D.I Yogyakarta, karena Polwan menjalankan tugas dan senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan peraturan yang berlaku, tidak memandang status sosial dan agama.
 - c. Polwan yang termasuk dalam relasi negatif, pemakain seragam dinas Polwan yang berjilbab hanya akan menghilangkan citra Polri yang netral dan plural, dan hanya akan mengurangi kekompakan sesama anggota Polwan yang berbeda agama di dalam Badan Kepolisian.
5. Respon publik tentang penggunaan seragam dinas Polwan berjilbab yaitu masyarakat dan polisi laki-laki dibagi menjadi 2 kategori :

- a. Relasi positif yaitu masyarakat dan polisi laki-laki yang setuju dengan pemakain seragam dinas Polwan berjilbab.
- b. Relasi negatif yaitu masyarakat dan polisi laki-laki yang tidak setuju dengan pemakaian seragam dinas Polwan berjilbab.

Dari hasil riset tentang penggunaan seragam dinas Polwan berjilbab kepada publik maka hasilnya, Ada kekhawatiran dari masyarakat citra plural dan netral Polri akan hilang karena dengan Polwan memakai jilbab berarti telah menunjukkan simbol agama yang nantinya Polri hanya akan memihak pada satu agama, namun dari kelompok yang setuju merespon Polwan memakai jilbab dapat menjadikan pelayanannya lebih baik, mendatangkan kharisma tersendiri bagi Polwan karena memang ada saat-saat dimana Polwan membutuhkan menggunakan jilbab dalam bertugas.

6. Dari hasil riset tidak ada perubahan pelayanan yang signifikan dari penggunaan seragam dinas Polwan berjilbab, karena Polri telah mempunyai peraturan internal tentang pelayanan dimana peraturan tersebut harus diikuti oleh semua personel anggota Polri. Namun jilbab dalam instansi Kepolisian dapat membantu memperbaiki citra Polri yang buruk disebagian masyarakat karena jilbab sebagai simbol agama berperan penting dalam kharisma pada masyarakat yang mayoritas beragama islam.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian “Jilbab Dan Potensi Eksklusivitas Polwan Polda D.I Yogyakarta” sebagai masukan dan menambah refrensi maka ada beberapa saran yang mungkin membangun antara lain:

1. Pemakain jilbab bagi Polwan berpengaruh positif terhadap kinerjanya , artinya pelayanan di Polda D.I Yogyakarta harus lebih baik lagi, untuk memperbaiki citra yang buruk di masyarakat, karena jilbab dianggap memiliki kharisma tersendiri bagi mayoritas masyarakat agama Islam di Yogyakarta.
2. Polri Tetap pada citra netral dan plural sehingga walaupun memakai jilbab tetap toleransi kepada sesama anggota Polwan dan masyarakat yang berbeda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghifari, Abu. *Jilbab Tapi Telanjang*. Bandung: Mujahid Press, 2004.
- *Jilbab Seksi*. Bandung: Media Qolbu. Cet II, 2005.
- Anonymymous. *Syariah Islam dijalur lambat*. Majalah Tempo, No. 11/XXXV/ Edisi 8-14 Mei, 2006.
- Al-Qurtubi, Abdullah Muhammad. *Al-jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*. Bairut: Daral Al-Qutub Al-Aliyah, 1993.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Al-Asymawi, Muhammad Sa'id. *Kritis Atas Jilbab Terj*. Novriantoni Kahar dan Opi TJ. Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2003.
- Baidan, Nasaruddin. *Tafsir Bi Al-Ra'yi Upaya Panggilan Konsep Wanita Dalam Al-Quran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993.
- Duwal, Qoidud. *Konsep Jilbab Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran K.H Husein Muhammad)*. Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- El Guindi, Fadwa. 2003. *Veil: Modesty, Privacy dan Resistance Terj*. Mujiburohman. Jakarta: Serambi, 2009.
- Geertz, Clifford. *Kebudayaan Dan Agama Terj*. Francisco Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Mahmud, M dimyati. *Psikologi Suatu Pengantar*. Yogyakarta: BPFE, 1989.
- Maleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Miles, Matthew B dan Michei Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

- Munawwir, Warson, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-indonesia Terlengkap*. Surabaya : Pustaka Progresif, 2002.
- Mutahhari, Murtadha. *Hijab : Gaya Hidup Wanita Islam Terj*, Agus Efendi Bandung: Mizan, 1995.
- Qadir, Mas'ud Khasan Abdul. *Kamus Istilah Pengertian Popolar*. Gresik: CV. Bintang Pelajar.
- Rais, Amin M. *Prospek Kebangunan Islam*. Bandung: Mizan.
- Ritzer, George, J Goodman Douglas. *Teori Sosiologi (Dari Teori Sosilogi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern)*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
- Salim, Jusbar Derby. *Busana Muslim Dan Permasalahannya*. Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembinaan Lembaga Islam Departemen Agama RI, 1984.
- Sarwono, Sarilito Wirawan. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Shihab, M Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendikiawan Kontemporer*. Jakarta: Lenterahati, 2004.
- Shiriharini. *Jilbab Dan Kiprah Perempuan Dalam Sektor Publik*. Jurnal PMI, Vol. IV. No. 1, September, 2008.
- Sukamto. *Nafsiologi Suatu Pendekatan Alternatif Atas Psikologi*. Jakarta: Integrita Press. 1985.
- Syuqah, Abu. *Busana Dan Perhiasan Wanita Menurut Al-Quran Dan Hadis*. Bandung: Mizan, 1998.
- Abdul Halim. *Busana Dan Perhiasan Wanita Menurut Al-Quran Dan Hadits Terj*. Mudzakir Abdussalam. Bandung: Mizan, 1998.
- Surtiretna, Nina. *Anggun Berjilbab*. Bandung: Al-Bayab, 2003.
- Ulfa, Diah. *Study Kritis Terhadap Pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL) Tentang Pemakaian Jilbab*. Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Umar, Nasarudin. *Menstrual Taboo Dalam Kajian Kultural Dan Islam*. Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta The Ford Foundation Dan Pustaka Pelajar, 2002.

Yafie, Ali, K.H. *Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung: Mirzan, 1994.

Zuhairin, Sukamto. *Ilmu Jiwa Umum*. Yogyakarta: Yayasan Lembaga Studi Islam Dan Sosial, 1986.

Sumber Lain:

Arie Basuki dan Dharmawan Sutanto. 2013. *Polwan Cantik Berjilbab Ikut Upacara di Polda Metro Jaya*.
<http://www.merdeka.com/peristiwa/polwan-cantik-berjilbab-ikut-upacara-di-polda-metro-jaya.html> Diakses Pada Tanggal 13 Januari 2014 Pukul 07.19.

Dani Prabowo. 2013. *Kapolri Perbolehkan Polwan Pakai Jilbab*.
<http://nasional.kompas.com/read/2013/11/19/1541071/Kapolri.Perbolehkan.Polwan.Pakai.Jilbab>. Diakses Pada Tanggal 24 November 2013 Pukul 8:48.

Dani Prabowo, 2013. *Soal Polwan Berjilbab, Oegroseno Bantah Selisih Pendapat Dengan Sutarman*.
<http://nasional.kompas.com/read/2013/12/02/1301435/Soal.Polwan.Berjilbab.Oegroseno.Bantah.Selisih.Pendapat.dengan.Sutarman>. Diakses Pada 13 Januari 2014 Pukul 08.00.

Dani Prabowo, 2013. *Wakapolri: Jilbab Polwan Harus Diatur, Jangan Malah Tambah Seksi*.
<http://nasional.kompas.com/read/2013/12/02/1208321/Wakapolri.Jilbab.Polwan.Harus.Diatur.Jangan.Malah.Tambah.Seksi>. Diakses Pada 13 Januari 2014 Pukul 08.23.

Dani Prabowo, 2013. *Sesuai Aturan, Polwan Tidak Bisa Pakai Jilbab*.
<http://nasional.kompas.com/read/2013/06/14/18332674/Sesuai.Aturan.Polwan.Tidak.Bisa.Pakai.Jilbab>. Diakses Pada 25 November 2013 Pukul 08:00.

Dharmawan Sutanto. 2013. *Ini Detail Seragam Polwan Berjilbab Polda Metro Jaya*. <http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-detail-seragam-polwan-berjilbab-polda-metro-jaya.html> Diakses Pada Tanggal 13 Januari 2014 Pukul 08.00 WIB.

Gilang Akbar Prambadi. 2013. *Kapolri: Mulai Besok, Polwan Silakan Berjilbab*.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/11/19/mwi0w5-kapolri-mulai-besok-polwan-silakan-berjilbab>. Diakses Pada Tanggal 26 November 2013 Pukul 08:46.

Hasanuddin Aco. 2013. *Kapolri Siapkan 60 Contoh Jilbab Polisi Wanita*. <http://wartakota.tribunnews.com/2013/12/16/kapolri-siapkan-60-contoh-jilbab-polisi-wanita> Diakses Pada Tanggal 13 Januari 2014 Pukul 07.00.

Id Wikipedia. *Pengertian Jilbab*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Jilbab>. Diakses Pada Tanggal 27 Desember 2013 Pukul 16:15.

Indonesia. *10 Penyebab Citra Polisi Jelek Dipandang Masyarakat*. <http://www.lihat.co.id/2013/04/10-penyebab-citra-polisi-jelek-di.html>, Diakses Pada Tanggal 27 Desember 2013 Pukul 16:04.

Pendidikan Polri Sekolah Polisi Wanita. *Sejarah Polwan*. <http://sekolahpolisiwanita.com/?page=sejarah>. Diakses pada tanggal 26 nov 2013 Pukul 09:00.

Polda DIY. *Profil Sejarah Polda DIY*. <http://jogja.polri.go.id/content/sejarah-polda-diy.html>. Diakses Pada Tanggal 24 November 2013 Pukul 08:00.

Polda DIY. *Visi Dan Misi Polda D.I Yogyakarta*. <http://jogja.polri.go.id/index.php?menu=profile&sub=visimisi> Diakses Pada Tanggal 24 November 2013 Pukul 08:48.

Polri Indonesia. *Makna Dan Arti Lambang.*

<http://jogja.polri.go.id/index.php?menu=profile&sub=artilambang> Diakses Pada Tanggal 24 nov 2013 Pukul 09:26.

Rusdy Nurdiansyah Dan Karta Raharja Ucu, *Jika Eropa Bolehkan Polwan Berjilbab, Kenapa Indonesia Melarang?.*

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/06/06/mnyv4b-jika-eropa-bolehkan-polwan-berjilbab-kenapa-indonesia-melarang.> Diakse Pada Tanggal 28 Desember 2013 Pukul 07:25.

Sidoarjo, *S.O.P GAKTIBPLIN Anggota Polri / PNS Unit P3D.*

<http://humas.polri.go.id/dms/SetiapSaat/SOP%20GAK%20PLIN%20ANGGOTA%20POLRES%20SIDOARJO.pdf>. Diakses Tanggal 27 Desember 2013 Pukul 16:04.

Syahrul Hidayat, *Polwan Unit Sabhara Polda Sumsel Pakai Jilbab.*

<http://palembang.tribunnews.com/2013/04/18/Polwan-Unit-Sabhara-Polda-Sumsel-Pakai-Jilbab>, Diakses Pada Tanggal 27 Desember 2013 Pukul 15:24.

Majalah:

Maya Herawati, *Langgar HAM*. Digital Newspaper Solopos, 5 Juni 2013.

Polda DIY. *Berbagai Kegiatan Digelar POLDA DIY Menyemarakkan Perayaan Hut Bhayangkara ke-67*. Majalah Manggala Naya Wiwarottama. Yogyakarta. Edisi Agustus 2013.

Polda DIY. *Data Riil Personel POLDA DIY*. Majalah Manggala Naya Wiwarottama. Yogyakarta. Edisi Januari 2014.

Polda DIY. *Hut Polwan ke-65 Wujudkan Pelayanan Prima, Gakkum Dan Anti KKN Polwan Siap Sukseskan Pemilu 2014*. Majalah Manggala Naya Wiwarottama. Yogyakarta. Edisi September 2013.

Sururin. *Pakaian Perempuan Perspektif Al-Quran*. Majalah Aulia, No 04/ThXXII April, 2000.

LAMPIRAN I

DAFTAR INFORMAN ANGGOTA POLWAN POLDA D.I YOGYAKARTA

No	Jabatan Informan	Jumlah
1.	SABHARA	20 Orang
2.	YANMA	5 Orang
3.	ROSDM	5 Orang
4.	BIDHUMAS	5 Orang
5.	SETUM	5 Orang
6.	RORENA	5 Orang
7.	BIDKUM	5 Orang
Jumlah		50 Orang

DAFTAR INFORMAN POLISI LAKI-LAKI POLDA D.I YOGYAKARTA

No.	Jabatan Informan	Jumlah
1.	SABHARA	20 Orang
2.	YANMA	5 Orang
3.	SPKT	5 Orang
4.	ROSDM	5 Orang
5.	RORENA	5 Orang
6.	SETUM	5 Orang
7.	HUMAS	5 Orang
Jumlah		50 orang

DAFTAR INFORMAN MASYARAKAT

No.	Nama	Pekerjaan
1.	Sulistiawati	Wiraswasta
2.	Dewi kurnia	PNS
3.	Moh. Hamdani	Wiraswasta
4.	Yono	Wiraswasta
5.	Khafidi	Wiraswasta
6.	Kharisma Anugrah	Mahasiswa
7.	Ari Fatmawati	Ibu Rumah tangga
8.	Galuh Martha	Ibu Rumah tangga
9.	Moh. Dahlan	Mahasiswa
10.	Mita Annisak	Mahasiswa
11.	Septiana Ambarini	Mahasiswa
12.	Candra Dinata	Guru
13.	Helmi	Guru
14.	Rahmawati	Guru
15.	Sayali	Guru
16.	Yuli	Guru
17.	Budi Asi	Guru
18.	Yuda	Wiraswasta
19.	Nurul Atmam	Anggota DPRD
20.	Arif	Mahasiswa
Jumlah		20 Orang

LAMPIRAN II

Pedoman Wawancara Kepada Publik (Masyarakat dan Polisi Laki-laki)

1. Bagaimana polwan mengenakan jilbab menurut anda?
2. Menurut anda apakah Polwan berjilbab akan terlihat lebih santun?
3. Menurut anda apakah Polwan berjilbab akan terlihat lebih agamis?
4. Menurut anda apakah Polwan berjilbab akan terlihat lebih menarik?
5. Menurut anda apakah citra Polri di masyarakat akan lebih baik?
6. Menurut anda apakah Polwan berjilbab tidak sesuai dengan tugas sehari-hari sebagai anggota polwan!?
7. Menurut anda apakah Polwan berjilbab akan mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat?
8. Menurut anda apakah Polwan berjilbab akan mempengaruhi kemitraan terhadap masyarakat?
9. Polwan berjilbab tidak menghargai sesama anggota polwan yang berbeda keyakinan?
10. Menurut anda apakah Polwan berjilbab tidak akan profesional dalam bertugas di lapangan?

Pedoman Wawancara Kepada Anggota Polwan Polda D.I Yogyakarta

1. Apa yang anda ketahui tentang jilbab?
2. Apakah anda setuju seragam polwan berjilbab?
3. Apakah anda terpaksa menggunakan seragam berjilbab?
4. Lebih nyaman mana seragam berjilbab dengan yang sebelumnya?
5. Apakah anda tertanggu dalam melaksanakan tugas dengan menggunakan seragam berjilbab?
6. Atas dasar apa anda menggunakan seragam berjilbab?
7. Apa yang memotivasi anda menggunakan seragam berjilbab?
8. Menurut anda apakah seragam berjilbab akan berpengaruh pada pelayanan anda?
9. Menurut anda apakah seragam berjilbab akan berpengaruh pada kemitraan Polri dengan masyarakat?
10. Menurut anda bagaimana citra Polri jika Polwan menggunakan seragam berjilbab?

LAMPIRAN III

PEDOMAN OBSERVASI

NO	POIN YANG DIOBSERVASI	HASIL
1.	Pelayanan Polwan di kantor.	Menghasilkan pelayanan Polwan di Polda D.I Yogyakarta yang bertugas di kantor sesuai peraturan dan kode etik Polri.
2.	Pelayanan Polwan di lapangan.	Menghasilkan pelayanan Polwan di Polda D.I Yogyakarta yang bertugas di lapangan sesuai peraturan dan kode etik.
3.	Penampilan Polwan.	Menghasilkan dua kategori: 1. Polwan berpenampilan sesuai S.O.P (<i>Standart Operation Prosedure</i>) 2. Polwan berpenampilan minor tidak sesuai dengan S.O.P (<i>Standart Operation Prosedure</i>).
4.	Interaksi sesama anggota Polwan.	Menghasilkan sesama anggota Polwan berinteraksi dengan baik tidak membedakan status sosial dan agama.
5.	Seragam yang digunakan.	Menghasilkan pemakaian seragam Polwan di Polda D.I Yogyakarta mengikuti peraturan Kapolri No: Skep/72/702/2005.

LAMPIRAN IV**Kapolri Perbolehkan Polwan Pakai Jilbab**

Selasa, 19 November 2013 | 15:41 WIB



TRIBUNNEWS/HERUDIN Kapolri Jenderal Sutarman (tengah) saat menghadiri acara silaturahmi Kapolri bersama insan pers di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Gedung Mabes Polri, Jalan Trunojo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2013). Pertemuan dengan awak media, baik media elektronik atau media cetak itu bertujuan untuk meminta dukungan pers agar bersama-sama membesarkan Polri.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian Republik Indonesia memberikan kelonggaran kepada polisi wanita yang ingin menggunakan jilbab pada saat berdinras. Peralnya, penggunaan jilbab tersebut merupakan hak pribadi seseorang.

"Itu hak asasi seseorang, saya sudah sampaikan kepada anggota kalau misalnya ada anggota yang mau pakai, silakan," kata Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman di sela-sela acara "Silaturahmi Kapolri dengan Insan Pers" di Ruang Rupatama Mabes Polri, Selasa (19/11/2013).

Kendati demikian, sampai saat ini belum ada aturan resmi yang dikeluarkan Kapolri terkait penggunaan jilbab. Aturan tersebut baru akan dikeluarkan setelah praktik penggunaan jilbab itu dijalankan dan dievaluasi.

Lebih lanjut, Sutarman mengatakan, dengan belum adanya aturan tersebut, maka belum ada anggaran khusus yang dikucurkan Polri untuk pengadaan jilbab. Polwan yang ingin menggunakan jilbab dipersilakan membeli sendiri jilbabnya.

"Anggaran belum ada, kalau mau beli, silakan. Contohnya kan sudah ada. Mulai besok kalau ada yang mau pakai saat tugas tidak masalah," ujarnya.

Seperti diberitakan, tidak diperbolehkannya penggunaan jilbab bagi polwan selama ini mengundang pro dan kontra dari masyarakat. Hingga saat ini, Polri belum memiliki aturan khusus untuk seragam polwan berjilbab, kecuali di Provinsi Aceh.

Seragam Polri, termasuk di dalamnya polwan, diatur dalam Surat Keputusan (SK) Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005. Tidak tertulis larangan berjilbab dalam surat keputusan Kapolri itu. Namun, semua anggota harus mengenakan seragam yang telah ditentukan.

Saat berdinastis, semua anggota wajib mengenakan seragam yang sama baik, mulai dari ujung kepala hingga kaki. Pengecualian dilakukan untuk polwan yang tidak mengenakan seragam, seperti bagian reserse dan intelijen. Mereka diperbolehkan berpakaian bebas ataupun mengenakan jilbab.

Sumber:

Dani Prabowo, 2013. "Kapolri Perbolehkan Polwan Pakai Jilbab".
<http://nasional.kompas.com/read/2013/11/19/1541071/Kapolri.Perbolehkan.Polwan.Pakai.Jilbab>. Diakses pada tanggal 24 November 2013 pukul 8:48.

LAMPIRAN V**Soal Polwan Berjilbab, Oegroseno Bantah Selisih
Pendapat dengan Sutarman**

Senin, 2 Desember 2013 | 13:01 WIB



Kompas.com/SABRINA ASRIL Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Oegroseno.

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Kepala Polri Komjen Pol Oegroseno menegaskan, ia tak berselisih pendapat dengan Kepala Polri Jenderal Pol Sutarman terkait penggunaan jilbab bagi polisi wanita (polwan). Namun, kata dia, penggunaan jilbab oleh polwan harus diatur dengan tegas.

"Enggak ada (masalah dengan Kapolri)," kata Oegroseno, menjawab pertanyaan wartawan ketika ditemui di sela-sela kegiatan HUT Polairud di Mako Polisi Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Senin (2/12/2013).

Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Pol Sutarman sebelumnya telah memberikan lampu hijau kepada para polwan yang ingin menggunakan jilbab. Menurut Sutarman, penggunaan jilbab termasuk hak asasi manusia.

Sehari setelah pernyataan Sutarman, sejumlah polwan telah mulai menggunakan jilbab. Menurut Oegroseno, pernyataan Sutarman terkait penggunaan

jilbab jangan diartikan secara gamblang. Pasalnya, belum ada regulasi yang mengatur penggunaan jilbab itu.

"Jadi, kata-kata besok itu kan bisa kata orang Jawa mbesok. Jadi bisa tomorrow, bisa the day after tomorrow. Yang jelas enggak yesterday," katanya.

Oegroseno menambahkan, keberadaan aturan yang mengatur penggunaan jilbab bagi polwan merupakan hal penting. Tujuannya ialah agar para polwan memiliki standar yang jelas dalam berseragam, di samping itu untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan para polwan dalam berseragam.

"Sekarang contoh polisi boleh bawa senjata api, boleh enggak saya beli senjata api sendiri. Perintah negara polisi boleh bawa senjata api, boleh nembak orang. Kalau enggak diatur boleh enggak saya nembak wartawan? Jadi harus diatur," katanya.

Sumber:

Dani Prabowo, 2013. "Soal Polwan Berjilbab, Oegroseno Bantah Selisih Pendapat denganSutarman".

[http://nasional.kompas.com/read/2013/12/02/1301435/Soal.Polwan.Berjilbab.](http://nasional.kompas.com/read/2013/12/02/1301435/Soal.Polwan.Berjilbab)

Oegroseno.Bantah.Selisih.Pendapat.dengan.Sutarman. Diakses pada 13 januari 2014 pukul 08.00

Wakapolri: Jilbab Polwan Harus Diatur, Jangan Malah Tambah Seksi

Senin, 2 Desember 2013 | 12:08 WIB



[kompas.com/dani prabowo](http://kompas.com/dani-prabowo) Wakapolri Komjen Pol Oegroseno

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com — Wakapolri Komjen Pol Oegroseno memiliki pandangan berbeda terkait penggunaan jilbab bagi para polwan. Menurutnya, penggunaan jilbab harus diatur di dalam sebuah aturan tertulis sehingga memiliki dasar hukum yang kuat.

"Saya sebagai Wakapolri harus amankan kebijakan itu bagaimana semua aturan karena organisasi negara harus tertulis," kata Oegroseno di sela-sela kegiatan HUT Polairud di Mako Polisi Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Senin (2/12/2013).

Seperti diberitakan, Kapolri Jenderal Pol Sutarman sebelumnya telah memberikan lampu hijau kepada para polwan yang ingin menggunakan jilbab. Menurut Sutarman, penggunaan jilbab termasuk hak asasi manusia.

Oegroseno menambahkan, aturan tertulis terkait penggunaan jilbab diperlukan agar terdapat keseragaman di antara para polwan. Dikhawatirkan, tanpa aturan yang jelas justru penggunaan jilbab hanya akan dijadikan sebagai sarana bagi para polwan untuk bersolek diri.

"Jangan sampai pakai jilbab nanti malah tambah seksi. Kalau menurut saya, mau pakai jilbab pakai baju terusan saja sekalian. Jangan sampai bajunya ketat, bodinya kelihatan, malah nimbulin nafsu-nafsu saja nanti," ujarnya.

Lebih lanjut, Oegroseno mengatakan jika saat ini para polwan tetap ingin menggunakan jilbab pada saat bertugas, mereka dipersilakan untuk pindah divisi yang memungkinkan untuk dapat menggunakan seragam yang jauh lebih bebas.

"Lebih mudah kalau ingin gunakan jilbab, silakan tugas di reserse atau intel. Tugas penyamaran pakai pakaian preman. Kalau seragam belum ada ketentuannya," tegasnya.

Sumber :

Dani Prabowo, 2013. "Wakapolri: Jilbab Polwan Harus Diatur, Jangan Malah Tambah Seksi".

<http://nasional.kompas.com/read/2013/12/02/1208321/Wakapolri.Jilbab.Polwan.Harus.Diatur.Jangan.Malah.Tambah.Seksi>. Diakses pada 13 januari 2014 pukul 08.23

LAMPIRAN VI**Kapolri Siapkan 60 Contoh Jilbab Polisi Wanita**

Senin, 16 Desember 2013 15:31 WIB



Seragam Polwan berjilbab dari berbagai kesatuan di Polda Metro Jaya, Senin (25/11/2013).

WARTA KOTA, SENAYAN - Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menegaskan ada 60 contoh model desain jilbab polisi wanita (Polwan) Polri yang disiapkan untuk dipilih satu sebagai jilbab seragam Polwan.

"Pak Timur (eks Kapolri Jenderal Timur Pradopo) dulu sudah memaparkan 60 contoh model jilbab yang nanti dipilih," kata Sutarman dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung DPR Jakarta, Senin (16/12/2013).

Sutarman menjawab pertanyaan anggota Dewan soal telegram rahasia Polri yang meminta penundaan penggunaan jilbab oleh Polwan.

Menurut Sutarman pemakaian jilbab oleh Polwan adalah hak setiap muslimat dan Polri pada dasarnya tidak keberatan.

"Hak itu sudah diberikan namun kewajiban seragam kenyataannya di lapangan kita cek setiap daerah berbeda-beda. Penggunaan jilbab berwarna-warni dan kesannya tidak baik maka untuk sementara kita akan atur untuk diseragamkan," kata Kapolri.

Sumber :

Hasanuddin Aco. 2013. "Kapolri Siapkan 60 Contoh Jilbab Polisi Wanita"
<http://wartakota.tribunnews.com/2013/12/16/kapolri-siapkan-60-contoh-jilbab-polisi-wanita> Diakses pada tanggal 13 januari 2014 Pukul 07.00.

Polwan cantik berjilbab ikut upacara di Polda Metro Jaya

Reporter : Arie Basuki, Dharmawan Sutanto | Senin, 25 November 2013 09:15



Merdeka.com - Polri mulai membuka pintu bagi para polisi wanita yang mengenakan jilbab. Contoh seragam polwan berjilbab dipamerkan dalam apel pasukan di Markas Polda Metro Jaya.

Pantauan merdeka.com, Senin (25/11), dalam apel pukul 07.00 WIB yang dipimpin Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno, ada sekitar 15 polwan berjilbab yang maju ke depan untuk memamerkan seragam model baru itu.

Dari tiap satuan memamerkan dua jenis seragam polwan berjilbab yakni pakaian dinas lapangan (PDL) dan pakaian dinas harian (PDH). Ada yang memakai rok panjang, ada juga yang memakai celana panjang.

Tampak para polwan dari kesatuan Brimob, Polantas, Polair, Provos, Pam Obvit. Mereka tampak cantik dengan balutan seragam dan jilbab yang menutup kepala. Kapolda Metro Jaya mengatakan, seragam polwan berjilbab itu masih merupakan sosialisasi.

Sumber :

Arie Basuki dan Dharmawan Sutanto. 2013. "Polwan cantik berjilbab ikut upacara di Polda Metro Jaya" <http://www.merdeka.com/peristiwa/polwan-cantik-berjilbab-ikut-upacara-di-polda-metro-jaya.html> Diakses pada tanggal 13 januari 2014 Pukul 07.19.

Ini detail seragam polwan berjilbab Polda Metro Jaya

Reporter : Dharmawan Sutanto | Senin, 25 November 2013 10:23



Merdeka.com - Pemandangan menarik terhampar di lapangan lalu lintas Polda Metro Jaya, ketika 15 Polisi Wanita (Polwan) memamerkan baju dinas khusus polisi wanita (polwan), seperti pakaian dinas upacara (PDU), pakaian dinas harian (PDH) dan pakaian dinas lapangan (PDL).

Dalam acara tersebut, turut dihadiri oleh Kapolda Metro Jaya Irlen Pol Putut Eko Bayuseno dan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Sudjarno serta pejabat teras Polda Metro Jaya dan sejumlah Polwan dari seluruh satuan kerja (satker).

"Ini menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan bapak Kapolri bahwa polwan diizinkan pakai jilbab bagi yang mau pakai jilbab. Tidak ada paksaan, bagi yang mau silakan pakai, bagi yang tidak mau tidak apa-apa," jelas Putut usai apel, Senin (25/11).

Putut menuturkan, peragaan tersebut dilakukan untuk keseragaman dan Polwan yang mengenakan jilbab memiliki seragam dinas yang akan dikenakannya.

"Seragam PDU, PDH dan PDL ini desainnya sama dengan polwan Aceh," ujar Putut.

Dalam peragaan ini ada 15 polwan lalu lintas yang memeragakan pakaian dinas berjilbab dari masing-masing Satker yakni PDH dan PDL Lalu Lintas, Brimob, Provost, Polair, Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit).

Untuk PDU, seragam polwan berjilbab menggunakan kemeja seragam warna hitam dan rok panjang warna hitam dan kerudung warna hitam. Untuk PDH, baju seragam polwan berjilbab ini mengenakan rok panjang warna coklat dan jilbab warna coklat. Sementara seragam PDL dibalut dengan celana panjang warna coklat dengan sepatu lars setinggi setengah betis.

Kemudian PDH Polantas seragam lengan panjang warna coklat dipadu kerudung putih dan pet Polantas warna putih, sementara bawahannya menggunakan rok panjang warna coklat tua, dibalut ikat pinggang khusus polantas berwarna putih dan sepatu pantofel warna hitam. Untuk PDL-nya seragam atasan sama, sedangkan bawahannya menggunakan celana panjang warna coklat tua, dipadu sepatu lars panjang.

PDH Polwan yang berdinasi di Pam Obvit, seragam atasan berwarna khas warna coklat dan pada kerah lengan dan saku yang berwarna merah tua, dipadu dasi panjang warna merah tua dan kerudung coklat tua serta pet warna coklat tua.

Setelah memeragakan pakaian dinas untuk polwan berjilbab, polwan-polwan ini kemudian Wakapolda Metro Jaya Brigjen Sujarno memerintahkan 15 polwan tersebut untuk melakukan baris-berbaris.

Semula, tidak ada kesulitan bagi polwan berjilbab ini. Namun, ketika disuruh berjalan, polwan berjilbab yang mengenakan rok tampak kesulitan berjalan. Desain rok yang ketat nyatanya membuat para Polwan tersebut kesulitan berjalan cepat.

Sumber :

Dharmawan Sutanto. 2013. "Ini detail seragam polwan berjilbab Polda Metro Jaya".

<http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-detail-seragam-polwan-berjilbab-polda-metro-jaya.html> Diakses pada tanggal 13 Januari 2014 Pukul 08.00

WIB

CURICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Jesika Eva Nur Subaidah
Tempat tanggal lahir : Pamekasan 12 Januari 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Telp / Hp : 08563330972
E-mail : Jezika-evans@yahoo.com

B. NAMA ORANG TUA

Ibu : R. Khairiyah
Bapak : Moh. Fadli
Alamat :Ds. Telagah Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan Madura

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN Telagah 1 : 1998-2004
MTsN Model Sumber Bungur Pamekasan : 2004-2007
MAN Pamekasan : 2007-2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2010-2014

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 5 Februari 2014

Jesika Eva N.S